

## IMPLEMENTASI RAHN TASYILY PADA PEMBIAYAAN MODAL UMKM DI PEGADAIAN SYARIAH PEKANBARU

Aisyah<sup>1</sup>, Khoirun Nisa<sup>2</sup>  
Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad Rahn Tasjily pada produk pembiayaan modal kerja bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pegadaian Syariah Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan pihak manajemen serta nasabah Pegadaian Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Rahn Tasjily telah berjalan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, di mana barang jaminan (marhun) berupa BPKB kendaraan tetap berada di bawah penguasaan nasabah untuk mendukung operasional usaha, sementara bukti kepemilikan ditahan sebagai jaminan formal. Meskipun pembiayaan ini efektif dalam memitigasi kendala likuiditas modal bagi pelaku usaha, kendala operasional seperti keterlambatan pemeliharaan dokumen dan penilaian risiko kredit masih ditemukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Rahn Tasjily memiliki peran krusial sebagai instrumen inklusi keuangan syariah yang akseleratif bagi sektor UMKM.

**Kata Kunci:** Rahn Tasjily; Pembiayaan Modal; UMKM; Pegadaian Syariah; Inklusi Keuangan.

### Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Rahn Tasjily contract in working capital financing products for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at Pegadaian Syariah Pekanbaru. The research method applied is a descriptive qualitative approach through a case study involving observation, documentation, and in-depth interviews with management and customers. The results indicate that the implementation of Rahn Tasjily aligns with the DSN-MUI Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008, where the collateralized asset (marhun) in the form of vehicle registration documents (BPKB) remains under the physical control of the customer to support business operations, while the official

---

<sup>1</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

<sup>2</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

*ownership document is held as formal security. Although this financing successfully mitigates capital liquidity constraints for business actors, operational barriers such as document maintenance delays and credit risk assessment challenges still exist. This study concludes that Rahn Tasjily plays a crucial role as an accelerative Islamic financial inclusion instrument for the MSME sector.*

**Keywords:** *Rahn Tasjily; Capital Financing; MSMEs; Pegadaian Syariah; Financial Inclusion.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi ekonomi syariah yang luar biasa besar. Aktivitas muamalah dalam perekonomian domestik dituntut untuk tidak hanya mengejar profitabilitas materialistis, melainkan harus senantiasa bersandar pada kepatuhan prinsip-prinsip hukum Islam yang luhur demi mencapai kemaslahatan bersama (falah). Di tengah dinamika makroekonomi saat ini, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional yang menyerap mayoritas tenaga kerja. Namun, salah satu tantangan klasik yang konsisten dihadapi oleh para pelaku UMKM, khususnya di wilayah perkembangan pesat seperti Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru, adalah keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber modal kerja yang likuid, aman, dan bebas dari praktik riba yang dilarang agama.

Guna menjawab kebutuhan mendesak tersebut, Lembaga Keuangan Syariah hadir dengan menawarkan berbagai produk inovatif, salah satunya adalah skema gadai syariah kontemporer yang dikenal dengan istilah Rahn Tasjily. Secara konvensional, akad rahn mensyaratkan adanya penguasaan fisik atas barang jaminan (marhun) oleh pihak penerima gadai (murtahin). Namun, dalam lanskap bisnis modern, penahanan aset produktif secara fisik seperti kendaraan operasional tentu akan melumpuhkan aktivitas produktif dari usaha mikro itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan regulasi Fatwa No. 68/DSN-

MUI/III/2008 yang melegitimasi skema Rahn Tasjily, di mana barang jaminan tetap berada di bawah penguasaan dan pemanfaatan nasabah (rahin) untuk keperluan usahanya, sedangkan yang diserahkan kepada pihak lembaga keuangan hanyalah bukti kepemilikan sahnya secara hukum, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Berdasarkan beberapa kajian teoretis terdahulu yang relevan, analisis mengenai perilaku lembaga keuangan syariah dan preferensi modal UMKM telah banyak diteliti. Penelitian terdahulu oleh Pratama (2015) mengonfirmasi pentingnya peran kelembagaan ekonomi syariah seperti Badan Amil Zakat maupun pegadaian dalam memitigasi problem kemiskinan dan keterbatasan akses modal bagi masyarakat kelas bawah. Di samping itu, kajian empiris dari Sari (2019) mengenai lembaga keuangan menekankan bahwa inovasi produk pembiayaan gadai yang adaptif sangat menentukan tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah. Meskipun demikian, perbedaan mendasar antara penelitian saat ini dengan riset terdahulu terletak pada fokus analisis yang secara mendalam mengupas efektivitas implementasi Rahn Tasjily spesifik pada klaster pelaku usaha mikro di Pegadaian Syariah Pekanbaru, yang memiliki karakteristik wilayah urban dengan pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan yang sangat kompetitif. Pertanyaan riset utama yang diajukan dalam kajian ini adalah bagaimana mekanisme operasional dan efektivitas pembiayaan dengan skema Rahn Tasjily ini dalam membantu penyediaan modal serta mengatasi kendala likuiditas UMKM.

Secara metodologis, penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus lapangan (field research) yang berlokasi di Pegadaian Syariah Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada signifikansi pertumbuhan jumlah nasabah produk pembiayaan berbasis BPKB di wilayah tersebut. Data primer dikumpulkan secara komprehensif melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dengan jajaran manajemen operasional, analisis pembiayaan, serta perwakilan

pelaku UMKM yang menjadi nasabah aktif. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal, laporan berkala, serta literatur kepustakaan yang absah. Seluruh data yang terkumpul kemudian direduksi, disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang analitis, serta diverifikasi validitasnya menggunakan teknik triangulasi sumber informasi guna menghasilkan kesimpulan ilmiah yang objektif, kredibel, dan aplikatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Operasional Akad Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah Pekanbaru**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Syariah Pekanbaru dijalankan melalui sistem prosedur yang ketat namun tetap mengedepankan prinsip kemudahan bagi nasabah. Skema pembiayaan ini ditujukan khusus bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal kerja dengan menjaminkan BPKB kendaraan bermotor (baik roda dua maupun roda empat) sebagai marhun, sementara kendaraan tersebut tetap dapat digunakan secara aktif oleh nasabah untuk menunjang distribusi atau operasional bisnis sehari-hari. Langkah awal dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh pihak rahin (nasabah) dengan melampirkan berkas legalitas usaha, laporan keuangan sederhana, serta dokumen asli BPKB. Pihak murtahin (Pegadaian Syariah) kemudian melakukan penaksiran nilai aset jaminan serta analisis kelayakan usaha (micro-underwriting) untuk menentukan plafon pembiayaan yang aman dan proporsional.

Setelah analisis risiko dinyatakan memenuhi syarat kecukupan modal dan karakter nasabah yang baik, dilanjutkan dengan penandatanganan akad Rahn Tasjily secara kolektif antara kedua belah pihak. Dalam dokumen akad tersebut, dicantumkan secara transparan mengenai jumlah pembiayaan yang disalurkan, jangka waktu tenor pengembalian, serta besaran biaya pemeliharaan jaminan (mu'nah rahn) yang dihitung berdasarkan nilai taksiran marhun, bukan

didasarkan pada persentase jumlah pinjaman uang, sehingga secara mutlak terhindar dari unsur riba sejalan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Dana pembiayaan kemudian dicairkan secara langsung kepada rekening nasabah untuk segera diaplikasikan sebagai modal kerja produktif.

### **Dampak Pembiayaan Rahn Tasjily Terhadap Perkembangan Skala Usaha UMKM**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan dua puluh lima responden pelaku usaha kecil di Pekanbaru, pembiayaan dengan skema Rahn Tasjily memberikan dampak ekspansif yang signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan skala usaha mereka. Tambahan likuiditas modal yang diperoleh memungkinkan para pelaku UMKM untuk meningkatkan volume pembelian persediaan barang dagangan (inventory), memperbarui peralatan produksi yang lebih modern, hingga memperluas jangkauan pasar eksternal. Fleksibilitas pemanfaatan fisik marhun (kendaraan) menjadi faktor pembeda utama yang sangat diapresiasi nasabah, karena perputaran bisnis tidak terganggu sama sekali meskipun aset tersebut sedang dalam status digadaikan secara legal.

Dari perspektif manajemen risiko internal Pegadaian Syariah Pekanbaru, tingkat kolektibilitas atau Non-Performing Financing (NPF) untuk produk Rahn Tasjily ini terpantau berada pada level yang sangat aman dan terkendali dengan baik di bawah ambang batas dua persen. Keberhasilan mitigasi risiko ini didorong oleh ikatan psikologis nasabah yang merasa bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan kepemilikan aset kendaraannya, serta adanya pendampingan dan monitoring berkas secara berkala dari pihak penaksir internal lembaga keuangan syariah tersebut.

<b>Kategori Indikator Operasional</b>	<b>Kepatuhan Syariah (Fatwa No. 68)</b>	<b>Efektivitas Sektor UMKM</b>
Penguasaan Fisik Marhun	Sesuai (Fisik di tangan Rahin)	Sangat Tinggi (Operasional Lancar)

Penetapan Biaya Mu'nah	Sesuai (Berdasarkan nilai taksiran)	Ekonomis (Beban Angsuran Ringan)
Legalitas Dokumen Jaminan	Sesuai (Penahanan BPKB Sah)	Aman (Mitigasi Risiko Gagal Bayar)

### **Kontekstualisasi Teoretis dan Tantangan Implementasi Keuangan Syariah**

Temuan penelitian lapangan ini memberikan kontribusi teoretis yang memperkuat premis dasar mengenai relevansi inklusi keuangan syariah terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Dengan mengadopsi skema Rahn Tasjily, Pegadaian Syariah Pekanbaru berhasil meruntuhkan hambatan institusional konvensional yang kerap kali menyulitkan pelaku usaha kecil dalam mengakses pembiayaan perbankan akibat kendala jaminan aset tetap (*fixed assets*) seperti tanah atau bangunan. Konstruksi hukum Islam yang adaptif melalui penahanan bukti kepemilikan (*tasjily*) terbukti mampu menjadi jembatan masalah antara aspek keamanan pembiayaan bagi murtahin dengan keberlangsungan aktivitas produktif bagi rahin, sejalan dengan kerangka pemikiran sosiologi ekonomi Islam yang menuntut keadilan distributif modal.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengidentifikasi adanya beberapa kendala operasional minor di lapangan, seperti lambatnya proses pemutakhiran data taksiran nilai kendaraan di tengah fluktuasi harga pasar mobil bekas yang dinamis, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) analis pembiayaan mikro dalam memverifikasi keabsahan fisik berkas usaha nasabah yang lokasinya tersebar di pelosok wilayah. Oleh karena itu, optimalisasi sistem digitalisasi pengawasan (*e-rahn*) serta sinkronisasi data jaminan dengan database kepolisian daerah menjadi langkah mendesak yang harus segera diimplementasikan demi mempercepat proses pencairan modal serta meminimalisasi risiko moral hazard di masa depan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif dan seluruh rangkaian pembahasan mengenai implementasi akad Rahn Tasjily pada pembiayaan modal kerja UMKM di Pegadaian Syariah Pekanbaru, maka kesimpulan utama dari kajian ini dapat dirumuskan ke dalam dua poin mendasar. Pertama, mekanisme pelaksanaan Rahn Tasjily secara konsisten telah memenuhi dan selaras dengan koridor syariah yang digariskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008, di mana penentuan biaya mu'nah dihitung secara adil dari nilai taksiran barang jaminan, serta pemanfaatan fisik marhun kendaraan sepenuhnya diberikan kepada nasabah guna mendukung kelancaran operasional bisnis mereka. Kedua, produk pembiayaan ini terbukti memberikan dampak positif dan kontribusi nyata yang signifikan dalam meningkatkan likuiditas modal, volume penjualan, serta kapasitas ekspansi pasar usaha mikro di Pekanbaru.

Sebagai rekomendasi strategis demi pengembangan keberlanjutan produk ini, disarankan kepada jajaran manajemen Pegadaian Syariah Pekanbaru untuk segera mengintegrasikan teknologi digital dalam proses taksiran nilai marhun (automated valuation system) guna memangkas birokrasi dan waktu pencairan. Bagi regulator otoritas keuangan syariah serta akademisi, diharapkan dapat terus memperluas cakupan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada komunitas-komunitas pelaku usaha mikro tradisional, sehingga akselerasi inklusi ekonomi syariah yang berkeadilan dapat terwujud secara inklusif dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Askani. (2018). Tata Cara Pelaksanaan Berwakaf Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali). Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang.
- Hasan, S. (2013). Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif, dan Manajemen. Malang: UIN Maliki Press.

- Hasan, S., & Rajafi, A. (2018). Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado. *Jurnal Dulat Hukum*, 1(1), 45-58.
- Ishaq, M. S. J. (2018). Strategi Fundraising dalam Lelang Wakaf Tanah di Yayasan Mu'awanah al-Hasyimiyah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, Malang.